

Heran Kades Kohod Bisa Beli Rubicon, Dede Yusuf: Kami Saja Belum Tentu Bisa Beli

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 31/01/2025



ORINews.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan menyinggung gaya hidup Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip, yang memiliki mobil mewah Rubicon.

Dede pun sampai merasa heran dengan hal tersebut.

Pasalnya, menurut Dede, anggota DPR saja belum tentu bisa membeli Rubicon.

“Bahkan, saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami (anggota DPR) saja belum tentu kebeli di sini,” ungkap dia dalam rapat antara Menteri ATR/BPN dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Dede menduga harta bergelimang yang dimiliki Arsin itu merupakan pertanda ada “permainan” pengembang di Desa Kohod.

Desa itu memiliki hak guna bangunan (HGB) paling banyak terkait pagar laut sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang.

Sebab, di desa lain di Kabupaten Tangerang, tidak ditemukan HGB pagar laut sama sekali, walaupun ada hanya tiga bidang saja.

“Jadi, ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan dan uniknya, ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak,” ungkap Dede.

“Agak unik karena Desa Kohod ini hampir mayoritas 263 bidang (HGB) 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah enggak ada, mungkin ada satu desa yang 3 bidang,” ujar Dede.

Dede lantas mempertanyakan alasan Desa Kohod menjadi lokasi yang paling banyak memiliki HGB pagar laut.

Padahal, di wilayah Desa Kohod sebenarnya tidak ada perluasan proyek strategis nasional (PSN).

“Pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa Desa Kohod? Kenapa harus di situ yang banyak? Padahal, kalau kita lihat, perluasan PSN tidak ada sama sekali.”

“Lalu, kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini Pemkab Tangerang, dengan mudah membuat RT/RW atau tata ruang tanpa melakukan pemantauan secara khusus,” tutur dia.

“Saya masih bingung, Pak Nusron, ya, kenapa Desa Kohod paling banyak dibanding dengan desa lain,” sambung Dede.

KKP Periksa Kades Arsin

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diketahui telah memeriksa Kades Arsin dalam kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang.

Pemeriksaan dilakukan pada Kamis (30/1/2025) di Kantor Kantor

Pusat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin.

“Pada 30 Januari 2025, KKP telah memanggil Kepala desa Kohod untuk dimintai keterangan,” ujar Doni saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

Selain Kades Arsin, KKP juga memeriksa 13 orang nelayan di hari yang sama.

Pemeriksaan yang dilakukan itu merupakan pengembangan dari pemeriksaan sebelumnya terhadap dua perwakilan nelayan dari Jaringan Rakyat Pantura (JRP) pada 21 Januari 2025.

“KKP menegaskan bahwa seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memastikan ketertiban dan ketaatan pengelolaan ruang laut yang berkeadilan,” kata Doni.

“(Hasil pemeriksaan) Akan dipelajari dan dikembangkan dari keterangan ini untuk pemanggilan lainnya,” tambahnya.

Doni juga menyebut, pemeriksaan merupakan bagian dari proses penegakan sanksi administratif sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2021, PP Nomor 85/2021, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/2021.

Sebelumnya, Kades Arsin menjadi sorotan usai berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, yang mempertanyakan soal pagar laut.

Dalam perdebatan itu, Kades Arsin bersikeras bahwa pagar laut yang terpasang di area pesisir pantai Alar Jimab dulunya merupakan lahan kosong yang sempat dijadikan kolam atau empang, yang kini berubah menjadi lautan akibat terkena

abrasi.

Karena pernyataannya ini, Kades Arsin disebut membela pagar laut.

Nama Kades Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X.[]